

RANCANGAN
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DPPKB)
KOTA JAMBI
TAHUN 2017



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

KATA PENGANTAR

Atas segala rahmat yang telah diberikan kepada kita, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala izin serta karuniaNya kita telah dapat menyusun Rancangan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2017. Rancangan Rencana Kerja ini merupakan proses Penyusunan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2013 – 2018.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan, akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan partisipasinya terhadap berbagai kegiatan Dinas PPKB Kota Jambi didalam mencapai sasaran serta indikator kegiatan kami ucapkan terima kasih.

Jambi, 2017
Kepala Dinas PPKB Kota Jambi



H.M. RASYID RIDO.S, SH,M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19591206 198212 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renja DPPKB Kota Jambi.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pelayanan BPPKB Kota Jambi	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPPKB Kota Jambi.....	11
a. Organisasi	11
b. Sarana dan Prasarana Mobilitas	12
c. Pencapaian Sasaran	12
2.4 Analisa Isu – isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPPKB Kota Jambi	14
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	15
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPPKB Kota Jambi	19
a. Tujuan Renja DPPKB Kota Jambi	19
b. Sasaran Renja DPPKB Kota Jambi	19
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	
4.1 Program	21
4.2 Kegiatan	21
BAB V PENUTUP	23

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	12
Tabel 2.2	12
Tabel 2.3.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi serta Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut harus berpedoman pada Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi yang pelaksanaannya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Jambi.

Untuk melaksanakan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembangunan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2017 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijadikan dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah (LP2P), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Jambi.
15. Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Untuk mengidentifikasi program dan kegiatan serta menentukan besaran nilai pagu indikatif anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi.

b. Tujuan

1. Untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.
2. Untuk menerapkan prinsip-prinsip Anggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana kerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Adapun, sistematika rencana kerja ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SPKD

2.4 Analisa Isu- isu Strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi DPPKB

2.5 Review terhadap rancangan awal SKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

BAB IV Program dan Kegiatan

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SPKD Tahun 2016 dan Capaian Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra SKPD merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat pelayanan dan kinerja SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi dan selanjutnya dilakukan evaluasi–evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi .

Berikut ini disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp. 7.254.000,- dengan output berupa terkirimnya surat menyurat dan tersedianya benda pos lainnya.

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi keuangan : 100 % (Rp. 7.254.000,-)

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp. 107.640.000,- dengan output berupa tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik gedung kantor

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi keuangan : 77.41 % (Rp. 83.332.781,-)

3. Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp. 15.000.000,- dengan output berupa terlaksananya belanja surat tanda nomor kendaraan kendaraan dinas/operasioal.

Realisasi Fisik : 100 %
 Realisasi keuangan : 88.38 % (Rp. 13.257.900,-)

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp. 116.760.000,- dengan output berupa terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan.

Realisasi Fisik : 100 %
 Realisasi keuangan : 93.54 % (Rp. 109.220.000,-)

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp.63.547.100,- dengan output berupa tersedianya alat-alat kebersihan serta petugas kebersihan kantor.

Realisasi Fisik : 100 %
 Realisasi keuangan : 99,72 % (Rp. 63.372.100,-)

6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp. 13.284.900,- dengan output berupa terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.

Realisasi Fisik : 100 %
 Realisasi keuangan : 99.99 % (Rp. 13.284.500,-)

7. Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp. 12.600.000,- dengan output berupa terpenuhinya kebutuhan penggandaan dokumen, kop surat, amplop, map logo BPPKB Kota Jambi.

Realisasi Fisik : 100 %
 Realisasi keuangan : 99,92 % (Rp. 12.590.000,-)

8. Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp.9.950.000,- dengan output berupa tersedianya lampu, baterai, alat-alat listrik lainnya serta perbaikan instalasi jaringan listrik kantor.

Realisasi Fisik : 100 %
 Realisasi keuangan : 100 % (Rp. 9.950.000,-)

9. Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp. 10.800.000,- dengan output berupa tersedianya penyediaan informasi/bahan bacaan surat kabar harian daerah dan nasional.

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi keuangan : 70.00 % (Rp. 7.560.000,-)

10. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp. 13.000.000,- dengan output berupa tersedianya makanan/minuman rapat dan tamu.

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi keuangan : 100 % (Rp. 13.000.000,-)

11. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp. 105.600.000,- dengan output berupa terlaksananya jasa pengaman kantor, penerangan melalui mobil unit penerangan dan pramubhakti.

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi keuangan : 100 % (Rp. 105.600.000,-)

12. Kegiatan Penyediaan Perjalanan Dinas

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp. 320.000.000,- dengan output berupa terlaksananya perjalanan dinas luar daerah.

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi keuangan : 99.59 % (Rp. 318.716.548,-)

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:

13. Pembangunan Kendaraan dinas/Operasional

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp. 321.006.700,- dengan output berupa terlaksananya pengadaan alat angkutan mikro bus.

Realisasi Fisik : 100 %
 Realisasi keuangan : 99.99 % (Rp. 321.005.388,-)

14. Pengadaan Peralatan perkantoran

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp. 24.000.000,- dengan output berupa terlaksananya pengadaan peralatan kantor, komputer, dan alat-alat studio.

Realisasi Fisik : 100 %
 Realisasi keuangan : 100 % (Rp. 24.000.000,-)

15. Pengadaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp. 454.950.000,- dengan output berupa terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional.

Realisasi Fisik : 100 %
 Realisasi keuangan : 96.72 % (Rp. 440.037.345,-)

16. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp. 16.815.000,- dengan output berupa terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan alat-alat kantor.

Realisasi Fisik : 100 %
 Realisasi keuangan : 99.79 % (Rp. 16.780.000,-)

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :

17. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp.56.250.000,- dengan output berupa tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk pegawai.

Realisasi Fisik : 100 %
 Realisasi keuangan : 100 % (Rp. 56.250.000,-)

IV. Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :

18. Kegiatan Bintek Implementasi peraturan Perundang-undangan

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp. 17.755.000,- dengan output berupa keikutsertaan pegawai dalam bintek

Realisasi Fisik : 100 %
 Realisasi keuangan : 99.69 % (Rp. 17.700.000,-)

19. Penilaian Angka Kredit

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp. 22.845.000,- dengan output berupa terlaksananya penilaian penyuluh KB dan bintek kepegawaian.

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi keuangan : 94.98 % (Rp. 21.700.000,-)

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :**20. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD**

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp. 10.550.000,- dengan output berupa terlaksananya penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi keuangan : 99.43 % (Rp. 10.490.000,-)

VI. Program Perencanaan Kerja SKPD, dengan kegiatan :**21. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD**

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp. 12.950.000,- dengan output berupa terlaksananya penyusunan, penggandaan dan penjilidan Rencana Kerja SKPD.

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi keuangan : 100 % (Rp. 12.110.000,-)

VII. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan kegiatan :**22. Kegiatan Pengembangan Data/Informasi**

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp. 395.135.500,- dengan output berupa terlaksananya orientasi kader pendataan, rekerda, rakor, rapat evaluasi, pengolahan data keluarga dan tersedianya data.

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi keuangan : 97.70 % (Rp.386.060.500,-)

VIII. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

23. Kegiatan Fasilitas pengembangan dan penguatan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan anak

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp. 529.627.000,- dengan output berupa pelatihan P2TP2A, peningkatan SDM P2TP2, sosialisasi KDRT dan pendampingkekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terlaksananya kota layak anak (KLA), Pembinaan GSI dan Perempuan Peduli Lingkungan.

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi keuangan : 96.32 % (Rp. 510.155.900,-)

24. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp. 424.514.500,- dengan output berupa terlaksananya Pembinaan organisasi perempuan dan terlaksananya pelatihan untuk kelompok usaha perempuan.

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi keuangan : 98.24% (Rp. 417.080.100,-)

IX. Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan :

25. Kegiatan Pembinaan dan operasional keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp. 579.231.500,- dengan output berupa terlaksananya pembinaan dan pelayanan peserta KB aktif dan peserta KB baru melalui kegiatan momentum serta pelatihan dan orientasi KB/KR

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi keuangan : 98.42 % (Rp. 570.102.500,-)

26. Kegiatan Institusi dan Partisipasi masyarakat serta KIE

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp. 822.574.800,- dengan output terlaksananya Pembinaan dan penilaian kader IMP, PPKBD, dan Sub PPKBD, Saka kencana dan Posdaya.

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi keuangan : 98.95% (Rp. 813.999.800,-)

27. Kegiatan Bantuan Operasional KB

Alokasi dana untuk kegiatan ini: Rp.386.220.000,- dengan output terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pendistribusian alat kontrasepsi.

Realisasi/ Capaian :

Sasaran : 100 %

Kegiatan : 92.05 % (Rp. 355.536.825,-)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi belum mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga pengukuran kinerja didasarkan pada pencapaian program dan kegiatan, untuk program dan kegiatan Tahun 2016, dari total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.869.861.000,-, realisasi keuangan sebesar 97,13% dan realisasi fisik sebesar 98,26% .

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi

Pada lima tahun kebelakang ada beberapa hal keberhasilan yang telah dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi yaitu :

a. Organisasi

Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dengan susunan organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Kepala yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dengan 3 (tiga) Subbag dan 4 (empat) Kepala Bidang dengan masing-masing membawahi 3 (tiga) Kasubbid.

Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1 Data Jumlah Pegawai BPPKB

Pegawai	Jumlah
Aparatur Sipil Negara	75
Tenaga Kontrak	43
Jumlah	118

b. Sarana dan Prasarana Mobilitas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi memiliki kendaraan dinas roda empat sebanyak 12 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 69 unit.

c. Pencapaian Sasaran

Dari tabel 2.2 dibawah ini terlihat perkembangan sasaran yang dicapai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi kurun waktu 2012–2016.

Tabel 2.2 Pencapaian Sasaran

NO	INDIKATOR	2016	2015	2014	2013	2012
1	Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR)	71,27	74,34	78,11	78,96	77,45
2	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	13,94	12,89	9,81	9,15	8,75
3	Persentase peserta KB aktif (PA) MKJP	15,33	15,67	14,60	11,29	11,26
4	Persentase tingkat putus pakai kontrasepsi	0,010	0,015	0,020	0,024	0,011

Dengan melihat perkembangan sasaran yang dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi, maka dapat dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

- a. Adanya Komitmen Walikota Jambi, DPRD Kota Jambi dan Instansi Terkait untuk mendukung pelaksanaan program pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi
- b. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak lembaga-lembaga terkait
- c. Tersedianya Grand Design pada Dinas PPKB Kota Jambi
- d. Mudah nya masyarakat memperoleh informasi tentang KB
- e. Adanya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang KB setiap tahun
- f. Adanya tujuan organisasi yang jelas, target kinerja yang terukur serta penilaian kinerja yang rasional dan proporsional dalam kaitannya dengan peningkatan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya ASN dilingkup DPPKB baik itu petugas Fungsional khusus atau Fungsional umum.
- b. Kurangnya tenaga Petugas Lapangan KB (PLKB) atau Penyuluh KB (PKB) di tingkat Kelurahan yang merupakan ujung tombak program KB karena mereka sudah beralih tugas ke SKPD diluar SKPD-KB dan purna tugas tidak diimbangi dengan penambahan atau pengantian melalui pengadaan pegawai.
- c. Belum adanya uraian tugas pokok dan fungsi Petugas Lapangan KB (PLKB) atau Penyuluh KB (PKB) di tingkat Kelurahan.
- d. Rendahnya Tingkat Pengetahuan dan Ketrampilan pengelolaan Program KB Nasional bagi IMP (PPKBD, Sub. PPKBD, Kelompok KB).
- e. Rendahnya pengetahuan Sikap dan Perilaku tentang BKB, BKR, BKL, BLK dan UPPKS bagi pengelola.

- f. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana serta kapasitas aparatur pelayanan KB.

2.4 Analisa Isu-Isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi

Analisis lingkungan diperlukan agar dapat mengetahui dan menetapkan faktor-faktor keberhasilan suatu organisasi baik terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Salah satu perangkat yang digunakan dalam menganalisa permasalahan adalah analisa SWOT, yaitu :

Faktor Lingkungan Internal

Strength (Kekuatan)

- a. Tersedianya anggaran / dana yang memadai.
- b. Terdapatnya Perda dan Perkada sebagai dasar hukum.
- c. Motivasi Kerja pegawai yang baik.
- d. Komitmen pimpinan dan staff untuk mewujudkan misi DPPKB

Weakness (Kelemahan)

- a. Sistem pendataan yang belum efektif.
- b. Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai.
- c. Koordinasi pihak internal dan eksternal belum optimal.
- d. Kualitas Pelayanan belum optimal.
- e. Responsibility aparatur yang masih rendah.

Faktor Lingkungan Eksternal

Opportunity (Peluang)

- a. Dukungan Eksekutif dan Legislatif
- b. Kondisi sosial kota yang aman dan kondusif.
- c. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan sistem informasi.
- d. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis.

Threat (Ancaman)

- a. Kondisi sosial politik tidak stabil.
- b. Adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan.
- c. Kesadaran masyarakat yang masih rendah

Dari hasil analisis lingkungan yang telah dilakukan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi telah dapat merumuskan faktor-faktor keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi. Penentuan faktor-faktor keberhasilan dilakukan melalui 4 (empat) strategi, yaitu :

1. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.
3. Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang
4. Mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

2.5 Review terhadap Rancangan Awal SKPD

Review rancangan SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2016 (terlampir) akan digunakan untuk membandingkan antara rancangan awal SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2016 dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2017, hal ini disebabkan karena program/kegiatan OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi bersifat rutin dan terus menerus.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi tahun 2016, maka evaluasi dan analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.5 Realisasi BPPKB Kota Jambi Tahun 2016

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2016		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Jumlah pelayanan administrasi yang diberikan	100	95	95
2		Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung kinerja	100	98	98

		aparatur			
3	Tercapainya kesetaraan dan keadilan Gender melalui terintegrasinya pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas keluarga	Jumlah penyelesaian penanganan pengaduan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan	100	97	97
4	Tercapainya pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari tindakan diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.	Meningkatnya penguatan kelembagaan pengArustamaan gender	100	97	97
5		Jumlah pembinaan yang dilakukan	100	97	97
6	Terciptanya kesadaran dan budaya masyarakat dalam program KB dan keluarga berkualitas;	Jumlah pembinaan yang dilakukan kepada kelompok binaan yang ada dimasyarakat (BKB,BKR,BKL,PIK KRR dan UPPKS)	100	98	98
7	Tercapainya peningkatan pengetahuan remaja tentang KRR dan pentingnya Keluarga Kecil Berkualitas serta peningkatan pendewasaan usia perkawinan;	1. Jumlah pelayanan KB gratis yang diberikan kepada masyarakat 2. Jumlah remaja yang ikut dalam kelompok PIK KRR	100	98	98
8		Terlaksananya pendistribusian	100	98	98

		alkon tepat waktu dan jaminan ketersediaan alkon di klinik KB			
9	Terciptanya peningkatan institusi masyarakat perkotaan dan peran serta masyarakat dalam program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;	Meningkatnya jumlah institusi KB	100	98	98
10	Terlaksananya penyerasian pelaksanaan dan pengembangan advokasi dan KIE;	Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dan masyarakat dalam program pelaksanaan KB	100	98	98
11	Terciptanya data dan informasi yang akurat tentang pemberdayaan perempuan dan KB	Terlaksananya kegiatan pengumpulan dan pengolahan data	100	97	97
12		Ketepatan waktu dalam pengolahan dan pelaporan data	100	97	97
13	Terciptanya profesionalisme dalam pelayanan, jejaring program KB, perlindungan perempuan dan anak serta revitalisasi infrastruktur;	Jumlah data yang dilaporkan tepat sasaran	100	97	97
14		Terkonsentrasinya pekerjaan petugas penyuluh lapangan KB 2. Tersedianya	100	100	100

		sarana pendukung kerja PLKB			
15		Tersedianya transportasi antar jemput akseptor KB	100	100	100
16		Tersedianya jumlah sarana kerja di klinik KB	100	100	100

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi adalah unsur pelaksana otonomi daerah untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Jambi dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selanjutnya, tugas-tugas tersebut dituangkan dalam bentuk rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, sasaran strategis dan kebijakan. Kemudian bila dikaitkan dengan rencana anggaran, maka diketahui seluruh OPD akan melakukan dalam bentuk program dan kegiatan.

Oleh karena itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi diharuskan menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA dan DPA) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi

a. Tujuan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi

Tujuan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan tujuan akhir dari organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi yakni menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Governance* dilingkungan instansi Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja.

2. Menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2017.

b. Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran rencana kerja yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi adalah;

1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana guna peningkatan kinerja aparatur
3. Meningkatnya Disiplin Aparatur
4. Meningkatnya kapasitas aparatur
5. Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan
6. Terwujudnya Kesesuaian Perencanaan
7. Tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dalam pelaksanaan prioritas Daerah yang dijabarkan pada program kegiatan dalam RENSTRA 2013-2018 yaitu:

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Perencanaan SKPD
- g. Pengembangan Data/Informasi
- h. Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

4.2 Kegiatan

Program tersebut diatas diuraikan dalam bentuk kegiatan yang merupakan kegiatan tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam
12. Perjalanan Dinas

13. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
15. Pengadaan mebeleur
16. Pengadaan peralatan perkantoran
17. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
18. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat – Alat Kantor
19. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
20. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
21. Penilaian Angka Kredit
22. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
23. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
24. Pengembangan Data/Informasi
25. Pembinaan dan operasional keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
26. Kegiatan institusi dan partisipasi masyarakat serta KIE
27. Bantuan Operasional KB
28. Pembinaan dan operasional ketahanan dan kesejahteraan keluarga
29. Pengadaan Konstruksi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana

Kegiatan tahun 2017 tersebut diatas adalah merupakan Belanja Langsung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.616.470.000 , dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2 Anggaran Belanja Langsung Dinas PPKB Kota Jambi

No.	Kegiatan	Jumlah
1	2	3
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.254.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	107.640.000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16.100.000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	126.360.000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	63.547.100
6	Penyediaan alat tulis kantor	18.603.900
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.600.000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	9.950.000

	bangunan kantor	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000
10	Penyediaan makanan dan minuman	13.000.000
11	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	105.600.000
12	Perjalanan Dinas	305.000.000
13	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	230.000.000
14	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	150.200.000
15	Pengadaan mebeleur	93.700.000
16	Pengadaan peralatan perkantoran	91.300.000
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	447.200.000
18	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	17.160.000
19	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	50.000.000
20	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15.000.000
21	Penilaian Angka Kredit	22.845.000
22	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12.400.000
23	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	10.300.000
24	Pengembangan Data/Informasi	435.000.000
25	Pembinaan dan operasional keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	699.078.500
26	Kegiatan institusi dan partisipasi masyarakat serta KIE	836.340.000
27	Bantuan Operasional KB	531.050.000
28	Pembinaan dan operasional ketahanan dan kesejahteraan keluarga	564.241.500
29	Pengadaan Konstruksi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	623.000.000

BAB V

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi ini yang merupakan rangkaian rencana Program dan Kegiatan untuk tahun 2017, kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan bantuannya kami ucapkan terimakasih. Kepada para pengendali agar senantiasa mempedomani Rancangan Rencana Kerja ini sebagai acuan didalam melaksanakan kegiatan.

Jambi, 2017
Kepala Dinas PPKB Kota Jambi



H.M. RASYID RIDO.S, SH, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19591206 198212 1 002